PAJAK – FASILITAS

2024

PERBUP BOGOR NO. 18, BD 2024/NO.18, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus jo Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor akan memberikan fasilitas dan kemudahan pajak daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Lido.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.12 Tahun 2019, PP No.40 Tahun 2021, PP No.69 Tahun 2021, PP No.35 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2012, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dalam pelaksanaan KEK Lido Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitas dan kemudahan. Fasilitas dan kemudahan berupa pemberian pengurangan PBB-P2 dan BPHTB sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Badan Usaha. Pengurangan PBB-P2 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: pengurangan PBB-P2 diberikan terhadap tanah dan/atau bangunan dari mulai proses pembangunan sampai dengan selesai dibangun sesuai rencana pembangunan pengelola yang dimohonkan setiap tahun, untuk paling lama 3 (tiga) tahun; dalam hal proses pembangunan tidak selesai sesuai dengan rencana pembangunan pengelola, maka pengurangan tidak dapat diberikan, kecuali tidak selesainya pembangunan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Pengurangan BPHTB diberikan kepada Badan Usaha atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pertama terhadap objek yang sama di KEK Lido.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan dilakukan oleh Bappenda dan berkoordinasi dengan Administrator KEK. Badan Usaha yang mendapatkan fasilitas dan kemudahan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam KEK Lido kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan paling sedikit memuat: laporan pengelolaan usaha dan/atau kegiatan usaha; rencana kegiatan usaha; laporan tahapan proses pembangunan. Pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK Lido dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil peninjauan kembali dilaporkan kepada Administrator KEK.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 9 Agustus 2024 dan ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2024.